

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas Kasih dan Penyertaannya, sehingga Rencana Kerja (RENJA) dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa Tenggara ini dapat diselesaikan.

Dalam Pelaksanaan Pembangunan, setiap SKPD diwajibkan untuk membuat Program dan Kegiatan atau Rencana Kerja (RENJA) untuk setiap tahun berjalan. Ini gunanya untuk menjadi usulan Program dan Kegiatan dalam rangka penyusunan APBD Kabupaten Minahasa Tenggara, agar supaya pelaksanaan Pembangunan dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Berdasarkan pemahaman tersebut diatas, maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa Tenggara dapat menyusun Rencana Kerja ini, dengan harapan dapat bermakna guna penyusunan APBD Kabupaten Minahasa Tenggara, dan dapat membangun akan masyarakat dan seluruh Aparat Pemerintah Khususnya yang ada di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa Tenggara ini

Ratahan, Februari 2017
**KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
KAB. MINAHASA TENGGARA.**

ANNA M. DOTULONG,S.Pd,MM.
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 196401061983042001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	2
BAB II Gambaran Umum	
A. Kondisi Umum Daerah Masa Kini	5
B. Kondisi yang diinginkan dan Proyeksi Kedepan.....	5
C. Tugas dan Fungsi.....	6
BAB III PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	
A. Visi, Misi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8
B. Tujuan.....	9
C. Sasaran 9
D. Strategi.....	10
BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN.....	11
BAB IV P E N U T U P.....	14

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada hakekatnya Pembangunan Nasional ditujukan untuk meningkatkan kualitas penduduk yang merupakan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga dapat mendukung pelaksanaan pembangunan Nasional yang berkelanjutan, oleh karena itu kebijakan dan program kependudukan, tidak semata-mata hanya sebagai upaya mempengaruhi pola dan arah demografi tetapi juga untuk mencapai kesejahteraan masyarakat lahir dan batin bagi generasi sekarang dan generasi mendatang.

Secara garis besar terdapat tiga aspek permasalahan kependudukan di Indonesia :

1. Berkaitan dengan kuantitas penduduk. Dalam permasalahan ini antara lain diwarnai dengan jumlah yang besar disertai dengan pertumbuhan yang tinggi, angka kelahiran yang tinggi, struktur umur muda.
2. Berkenaan dengan kualitas penduduk seperti angka kematian tinggi, pendidikan rendah, angka kemiskinan tinggi.
3. Persebaran penduduk antar wilayah yang ada sangat timpang, baik antar pulau maupun antar perkotaan dan pedesaan.

Kualitas penduduk Indonesia yang masih rendah ini terjadi hampir di seluruh wilayah, baik di daerah padat maupun di daerah jarang penduduk. Jika kelahiran penduduk tidak dikelola, maka akan semakin banyak lahir penduduk baru dengan kualitas yang rendah.

Daerah yang saat ini jarang penduduknya akan semakin diisi oleh penduduk baru yang rendah pula kualitasnya. Dampaknya adalah akan semakin sulit bagi pemerintah daerah untuk memajukan daerahnya masing-masing.

Dalam konteks kualitas penduduk yang rendah, penting untuk digaris bawahi bahwa ada kaitan erat antara angka kelahiran dengan kemiskinan. Berbagai hasil survey menunjukkan bahwa TFR perempuan dengan indeks kesejahteraan terendah (miskin) lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan dengan indeks kesejahteraan tinggi. Fenomena ini mempunyai implikasi yang mendasar bagi keberhasilan pembangunan di Indonesia. Kalau program KB tidak berhasil, khususnya dalam hal

memberikan pelayanan kontrasepsi bagi penduduk miskin, dapat dipastikan upaya untuk mengentaskan kemiskinan akan semakin sulit, karena pertumbuhan penduduk miskin ini akan jauh lebih cepat dari mereka yang tidak miskin sehingga jumlah dan persentase penduduk miskin di Indonesia akan semakin besar. Dalam konteks ini pelaksanaan program KB dapat berfungsi sebagai pemutus rantai kemiskinan di Indonesia.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080) ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
5. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ;
6. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi ;

7. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 92/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2008-2028;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 6 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lainnya di Kabupaten Minahasa Tenggara.

A. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa Tenggara adalah;

1. Memberikan arah dan pedoman dalam melaksanakan tugas untuk menentukan kegiatan strategis di bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu Satu Tahun.
2. Mempermudah pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, para pemangku kepentingan (stakeholders), monitoring, analisis data, evaluasi/pemantapan program baik secara internal maupun eksternal.
3. Memberika informasi ke semua pihak yang berkepentingan untuk memiliki pandangan yang sama dalam pencapaian program yang lebih maksimal.
4. Menjadi acuan bagi Badan Kependuduan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara dalam upaya mencapai prioritas peningkatan kualitas SDM.

Tujuan dari penyusunan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa Tenggara adalah untuk mengantisipasi terhadap perubahan lingkungan strategis, adaptasi perkembangan dalam memanfaatkan peluang dan tantangan guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan di Kabupaten Minahasa Tenggara.

Di samping itu Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana juga merupakan instrumen untuk menentukan arah pembangunan dalam pelaksanaan dan, memberi gambaran tentang Visi, Misi, Program Prioritas dan Indikator Kinerja Badan Kependudukan dan KB.

B. Sistematika Penulisan

Rencana kerja tahun 2017 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Minahasa Tenggara disusun dengan tata urutan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini menjelaskan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

Bab II : Gambaran umum

Bab ini menjelaskan Kondisi Daerah masa kini, Kondisi yang di inginkan dan proyeksi kedepan, Tugas dan Fungsi Dinas.

Bab III : Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Bab IV : Program dan Kegiatan

Bab V : Penutup

BAB II

GAMBARAN UMUM

A. KONDISI UMUM DAERAH MASA KINI

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Minahasa Tenggara No 52 Tahun 2007 tentang Pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara dengan tugas Pokok yaitu : Melaksanakan Kewenangan Daerah dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta perumusan kebijakan teknis pemberian Pelayanan Keluarga Berencana dan pengelolaan unit pelaksana Dinas, pengelolaan urusan ketatalaksanaan, pembinaan teknis operasional.

Dalam Rangka Implementasi Pelaksanaan Tugas maka telah disusun rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara tentang uraian tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Dalam pelaksanaan tugasnya, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD tahun 2013 – 2018 serta Rencana Kerja tahun 2017 dan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA – SKPD) tahun 2017. Disamping menunggu Peraturan Daerah dan ketentuan lainnya yang akan dijadikan dasar maupun acuan dan Pedoman operasional maka telah diupayakan Sarana dan Prasarana kantor sebagai pusat kegiatan administrasi dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta sarana penunjang lainnya dengan kapasitas yang masih sangat terbatas dan kurang, namun semangat serta tekad dalam menunjang pembangunan daerah yang baru yakni Kabupaten Minahasa Tenggara di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, sudah berjalan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Seperti halnya langkah awal dengan mengadakan pendataan, pembinaan, serta pelaksanaan.

B. KONDISI YANG DIINGINKAN DAN PROYEKSI KEDEPAN

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Minahasa Tenggara sesuai dengan Visi dan Misi serta tujuannya maka harapan agar apa yang diinginkan dan menjadi maksud dan tujuan dapat terwujud secara nyata agar kedepan Kabupaten Minahasa Tenggara yang merupakan daerah yang baru dapat menyetarakan dengan Kabupaten/ Kota lainnya yang sudah lama yang sudah nampak pembangunannya serta juga untuk kedepan maksud dan tujuan Meningkatkan kemandirian Keluarga Berencana dapat meningkatkan ketahanan dan

kesejahteraan keluarga dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang melalui pembangunan keluarga kecil bahagia sejahtera.

C. TUGAS DAN FUNGSI

1. Tugas

Berdasarkan Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa Tenggara adalah unsur pendukung tugas Kepala Daerah di bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana.

2. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kependudukan dan KB melaksanakan fungsi :

- i. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional ;
- ii. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis ;
- iii. Penyelenggaraan pembinaan dan kerja sama dengan instansi dan organisasi lain di Kabupaten Minahasa Tenggara.

b. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa Tenggara berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lainnya di Kabupaten Minahasa Tenggara adalah :

Susunan Organisasi Dinas adalah:

- a) Kepala Dinas;
- b) Sekretaris, membawahkan:
 - 1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan
 - 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian
- c) Bidang Pengendalian Penduduk Penyuluhan dan Penggerakkan terdiri atas:
 - 1) Seksi Advokasi dan Penggerakkan
 - 2) Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB
 - 3) Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga
- d) Bidang Keluarga Berencana terdiri atas :
 - 1). Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alokasi
 - 2). Seksi Jaminan Pelayanan KB
 - 3). Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan ber-KB
- e) Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga terdiri atas:
 - 1). Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera
 - 2). Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia
 - 3). Seksi Bina Ketahanan Remaja
- f) Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

A. Visi, Misi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Visi Badan Kependudukan dan KB Kabupaten Minahasa Tenggara ditetapkan sebagai berikut :

“Penduduk Tumbuh Seimbang Tahun 2020“.

Misi : ***Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Kependudukan dan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera,***

dilakukan melalui :

1. Penyerasian kebijakan pengendalian penduduk
2. Penetapan parameter penduduk
3. Peningkatan penyediaan dan kualitas analisis data dan informasi
4. Pengendalian penduduk dalam pembangunan kependudukan dan KB
5. Mendorong stakeholder dan mitra kerja untuk menyelenggarakan pembangunan KB dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja, pemenuhan hak-hak reproduksi, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga peserta KB
6. Menggalang kemitraan dalam upaya peningkatan kesejahteraan, kemandirian, dan ketahanan keluarga dan memantapkan *Program Tribina* (BKB, BKR, BKL) dalam mewujudkan Keluarga Harmonis.
7. Meningkatkan kualitas pelayanan KB dan KS
8. Meningkatkan upaya-upaya promosi, perlindungan dan pemenuhan hak klien KB
9. Mempersiapkan SDM berkualitas sejak pembuahan dalam kandungan sampai dengan usia lanjut ;

B. Tujuan

Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai, atau gambaran kondisi yang ingin dicapai di masa datang dengan mempertimbangkan faktor-faktor internal / eksternal dan selaras dengan perwujudan visi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing sesuai dengan visi misi yang telah ditetapkan. Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Minahasa Tenggara merumuskan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemandirian Keluarga Berencana
2. Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang melalui pelebagaan keluarga kecil bahagia sejahtera.

C. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan dengan memperhatikan hasil yang akan dicapai sehingga dapat ditentukan dalam nilai kualitatif/kuantitatif. Berdasarkan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang ingin dicapai adalah :

1. Menurunkan Unmetneed / Pasangan Usia Subur yang Tidak ingin ber KB yang di tandai dengan :
 - a) Meningkatnya Prosentase Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB hingga 78,20% di periode akhir Renstra
 - b) Meningkatnya Prosentase Cakupan PUS peserta KB anggota UPPKS yang ber-KB mandiri hingga 72 % di akhir periode Renstra
 - c) Terpenuhinya Jumlah penyuluh KB/petugas lapangan KB/PLKB hingga 24 orang di periode akhir Renstra
 - d) Terpenuhinya Jumlah Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap Desa/Kelurahan hingga 100%
 - e) Meningkatnya Prosentase Cakupan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi hingga 85% di periode akhir Renstra
 - f) Meningkatnya Jumlah penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan hingga 144 Dokumen di periode akhir Renstra

2. Menurunkan Rata-rata laju pertumbuhan Penduduk dan Angka Kelahiran total ditandai dengan :
 - a) Rata-rata Jumlah Anak dalam Keluarga
 - b) Menurunnya Jumlah Jiwa dalam Keluarga
 - c) Menurunnya Jumlah PUS yang istrinya di bawah 20 tahun
 - d) Meningkatnya Prosentase Peserta KB Baru
 - e) Meningkatnya Prosentase Peserta KB aktif
 - f) Meningkatnya Jumlah Peserta KB baru MKJP

D. Strategi

Untuk mencapai tujuan sesuai yang diinginkan maka kebijakan yang diambil yaitu :

1. Melakukan Pelayanan KB Gratis
2. Penyerasian kebijakan pengendalian penduduk
3. Penetapan parameter penduduk
4. Peningkatan penyediaan dan kualitas analisis data dan informasi
5. Pengendalian penduduk dalam pembangunan kependudukan dan KB
6. Mendorong stakeholder dan mitra kerja untuk menyelenggarakan pembangunan KB dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja, pemenuhan hak-hak reproduksi, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga peserta KB
7. Menggalang kemitraan dalam upaya peningkatan kesejahteraan, kemandirian, dan ketahanan keluarga dan memantapkan *Program Tribina* (BKB, BKR, BKL) dalam mewujudkan Keluarga Harmonis.
8. Meningkatkan kualitas pelayanan KB dan KS
9. Meningkatkan upaya-upaya promosi, perlindungan dan pemenuhan hak klien KB Mempersiapkan SDM berkualitas sejak pembuahan dalam kandungan sampai dengan usia lanjut

BAB IV

PROGRAM DAN KEGIATAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka disusunlah program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa Tenggara. Adapun faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan adalah sebagai berikut

1. Penyerasian kebijakan pengendalian penduduk
2. Penetapan parameter penduduk
3. Peningkatan penyediaan dan kualitas analisis data dan informasi
4. Pengendalian penduduk dalam pembangunan kependudukan dan KB
5. Mendorong stakeholder dan mitra kerja untuk menyelenggarakan pembangunan KB dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja, pemenuhan hak-hak reproduksi, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga peserta KB
6. Menggalang kemitraan dalam upaya peningkatan kesejahteraan, kemandirian, Dan ketahanan keluarga dan memantapkan *Program Tribina* (BKB, BKR, BKL) dalam mewujudkan Keluarga Harmonis.
7. Meningkatkan kualitas pelayanan KB dan KS ;
8. Meningkatkan upaya-upaya promosi, perlindungan dan pemenuhan hak klien KB
9. Mempersiapkan SDM berkualitas sejak pembuahan dalam kandungan sampai dengan usia lanjut ;

Program :

1. Bidang Pengendalian Penduduk Penyuluhan dan Penggerakan

- Penyusunan Profil Kependudukan
- Penyusunan Rancangan Induk kependudukan
- Penyusunan Parameter Kependudukan

- Sosialisasi Kebijakan Kependudukan
- Melaksanakan pengelolaan informasi keluarga dan pelaksanaan administrasi

2. Bidang Keluarga Berencana

- Melayani peserta KB baru
- Membina peserta KB aktif
- Melayani peserta KB keluarga miskin melalui pelayanan KB gratis
- Promosi perlindungan peserta KB
- Pertemuan medis
- Advokasi partisipasi pria untuk ber-KB
- Kegiatan momentum antara lain
 1. KB – Kes TNI
 2. KB Kes – PKK – Bhayangkari
 3. KB Kes – PKK – IBI
- Pemantapan peran bidan desa dan pelayanan keluarga
- Pengembangan KB perusahaan pada pelayanan program KB
- Pembinaan KB keliling (PKBK)
- Penilaian KB Lestari Teladan 20 tahun, 15 tahun dan 10 tahun
- Pengembangan pelayanan klinik KB swasta
- Khiba (kesehatan Ibu Bayi dan Anak)

3. Bidang Ketahanan dan Keluarga Sejahtera

- Mengusulkan dana bantuan kredit tanpa jaminan kepada BKKBN Pusat bagi kelompok UPPKS antara 5 – 10 kelompok.
- Membentuk Bina-bina percontohan di setiap Kecamatan minimal tiap kecamatan 2 kelompok.
- Memonitoring jumlah kelompok UPPKS yang menerima bantuan modal usaha
- Mengadakan monitoring kegiatan PIKR yang memiliki sarana bantuan laptop, LCD untuk menunjang sosialisasi

- Mempersiapkan lomba-lomba dalam rangka Hari Keluarga Nasional (Harganas) pada Bulan Juli setiap tahun berjalan.
- Orientasi kesehatan reproduksi remaja bagi pengurus PIK-KRR bagi guru SMU, pengurus OSIS dan Organisasi Remaja dan Pemuda
- KIE pendewasaan
- KIE penyuluhan HIV/AIDS dan PMS bagi pengurus OSIS tingkat SMU dan Pengurus Remaja Gereja dan Mesjid

BAB V

PENUTUP

Rencana kerja tahunan merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam renstra, dan akan dilaksanakan oleh satuan organisasi melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana kerja ini disusun agar supaya indikator yang ada di sasaran strategis dapat tercapai pada tahun yang berjalan.

Demikian Renja SKPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2017 disusun untuk perencanaan selama tahun 2017. Semoga apa yang tersaji dapat memberikan masukan untuk perencanaan yang lebih baik untuk tahun-tahun yang akan datang.

BAB III

Evaluasi Renja Tahun Anggaran Sebelumnya

2.1 Evaluasi Renja Tahun Anggaran 2017

PROGRAM	KEGIATAN						
	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tkt Capaian (Target 2016)	Realisasi 2016	Persentase Pencapaian (Realisasi Target)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum	Input : Dana Output : Tersedianya Administrasi Umum Outcome : Terlaksananya administrasi Umum	12 bln	332.053.000	306.642.000	92,35%	
	Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan	Input : dana Output : Tersedianya jasa pengelolaan administrasi keuangan SKPD Outcome : Terlaksananya administrasi keuangan	9 org	34.440.000	32.940.000	94,64%	
	Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang dan Jasa	Input : Dana Output : Tersedianya jasa pengelolaan barang milik daerah Outcome : Terlaksananya Pengelolaan Barang dan Jasa	6 org	35.820.000	35.430.000	98,91%	

PROGRAM	KEGIATAN						
	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tkt Capaian (Target 2016)	Realisasi 2016	Persentase Pencapaian (Realisasi Target)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penunjang Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Input : Dana Output : Terselenggaranya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi baik dalam maupun luar daerah Outcome : Terlaksananya Rapat dan konsultasi dalam maupun luar daerah	12 bln	160.356.000	156.811.600	97,79%	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Input : Dana dan SDM Output: Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional yang representatif untuk menunjang tugas perkantoran Outcome : Terpeliharanya kendaraan dinas	5 Unit	103.000.000	101.855.000	98,89%	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Input : Dana dan SDM Output : Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Outcome : Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	30 Paket	21.000.000	20.480.000	97,52%	
Program Peningkatan Pengembangan Sitem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	Penyusunan Lakip	Input : Dana dan SDM Output : Tersedianya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Outcome:Adanya Laporan Kinerja Instansi	1 Dokumen	2.000.000	2.000.000	100%	

PROGRAM	KEGIATAN						
	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tkt Capaian (Target 2016)	Realisasi 2016	Persentase Pencapaian (Realisasi Target)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
		Pemerintah yang Akurat					
	Penyusunan Renja	Input : Dana dan SDM Output : Tersedianya Laporan Rencana Kerja Outcome:Adanya Laporan Rencana Kerja yang Akurat	1 Dokumen	2.000.000	2.000.000	100%	
	Penyusunan RKA SKPD	Input : Dana dan SDM Output : Tersedianya Rencana Anggaran Outcome:Adanya Rencana Anggaran	1 Dokumen	2.000.000	2.000.000	100%	
Program Keluarga Berencana	Pengadaan Sarana Mobilitas Tim KB Keliling	Input : Dana dan SDM Output : Tersedianya Sarana Mobilitas Tim KB Keliling Outcome:Menunjang Kelancaran Penyaluran ALOKON	1 Unit	305.000.000	272.700.000	87,41%	

PROGRAM	KEGIATAN						
	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tkt Capaian (Target 2016)	Realisasi 2016	Persentase Pencapaian (Realisasi Target)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
	Peningkatan Pelayanan KB Kepada Masyarakat	Input : Dana Output ; Tersedianya BKB KIT,KIE Kit,IUD KIT dan Genre Kit dalam menunjang kinerja Outcome : MeningkatnyaPeserta KB dan Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga	90 Paket	563.000.000	563.000.000	100%	
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Input : Dana dan SDM Output : Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Outcome:Menunjang Kelancaran Administrasi PERkantoran	14 Unit	174.000.000	173.606.000	99,77%	
	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Lanjutan 2016	Input : Dana dan SDM Output : Tersedianya Balai penyuluh KB yang representatif Outcome : Meningkatnyapelayanan KB di kecamatan	1 Paket	91.076.400	91.076.000	100%	
Program Pengendalian dan Pendistribusian ALOKOn	Pengadaan Obat Kontrasepsi	Input : Dana Output : Tersedianya Obat kontrasepsi	1 Paket	20.000.000	19.975.500	99,88%	Program Pengendalian dan Pendistribusian

PROGRAM	KEGIATAN						
	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tkt Capaian (Target 2016)	Realisasi 2016	Persentase Pencapaian (Realisasi Target)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
		Outcome : terlaksananya pelayanan KB					ALOKO n
Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Rapat Kerja Daerah	Input : Dana dan SDM Output : Terselenggaranya kegiatan Rakerda Outcome : Terciptanya kesepakatan bersama dalam peningkatan program KependudukanKB,Dan KS	150 Org	30.000.000	30.000.000	100%	
	Kegiatan Hari Keluarga Nasional	Input : Dana dan SDM Output : Terselenggaranya kegiatan Harganas Outcome : Meningkatnya pengetahuan tentang program KB dan KS	3 Org	24.000.000	24.000.000	100%	
Program Pergerakan Lini Lapangan	Evaluasi Program Pergerakan Lini Lapangan	Input : Dana dan SDM Output : Tersedianya Personil Honorer PLKB Gaya Baru Outcome : Meningkatnya Pelayanan KependudukanKB dan KS	12 Balai	221.700.000	217.226.000	98.00%	

PROGRAM	KEGIATAN						
	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tkt Capaian (Target 2016)	Realisasi 2016	Persentase Pencapaian (Realisasi Target)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
	Operasional Balai penyuluh KB (DAK Non Fisik)	Input : Dana dan SDM Output : Tersedianya gedung PLKB yang memadai Outcome : Meningkatnya Pelayanan KependudukanKB dan KS	12 Balai	630.300.000	515.351.600	81,76%	
	Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi (DAK Non Fisik)	Input : Dana Output : Tersedianya obat kontrasepsi di klinik pemerintah dan swasta Outcome : Meningkatnya Pelayanan KB yang bermutu	24 Klinik	36.120.000	25.500.000	70,60%	
Program Pengembangan Ketahanan Keluarga	Pembinaan Kader Bina Keluarga Balita	Input : Dana dan SDM Output : Terlaksananya Pembentukan Kelompok BKB Outcome : Meningkatnya cakupan jml kelompok BKB Yang ber-KB	60 Org	20.000.000	14.000.000	70%	
	Pembinaan PIK-R	Input : Dana dan SDM Output : Terlaksananya Penyuluhan Kelompok	60 Org	20.000.000	20.000.000	100%	

PROGRAM	KEGIATAN						
	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tkt Capaian (Target 2016)	Realisasi 2016	Persentase Pencapaian (Realisasi Target)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
		PIK - R Outcome : Menurunya Angka Perkawinan Usia Dini					
Program Peningkatan Kualitas Pendataan Keluarga	Sosialisasi Pendataan Keluarga	Input : Dana dan SDM Output : Terlaksananya sosialisasi pendataan keluarga Outcome: Mendapatkan Hasil Pendataan yang akurat	144 Org	22.500.000	22.500.000	100%	
Program Pengembangan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera	Temu Karya Kelompok UPPKS Tingkat Nasional	Input : Dana dan SDM Output : Pelaksanaan temu Karya Kelompok UPPKS Tingkat Nasional Outcome: Terlaksananya Temu Karya Kelompok UPPKS Tingkat Nasional	1 Org	7.600.000	7.600.000	100%	
Program Pengelolaan dalam Penyusunan informasi Kependudukan	Penyusunan parameter kependudukan	Input : Dana dan SDM Output : Terlaksananya parameter kependudukan Outcome: Mendapatkan Hasil data penduduk	1 Dokumen	10.000.000	10.000.000	100%	

PROGRAM	KEGIATAN						
	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tkt Capaian (Target 2016)	Realisasi 2016	Persentase Pencapaian (Realisasi Target)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penyusunan Profil Kependudukan	Input : Dana dan SDM Output : Terlaksananya Profil kependudukan Outcome: Mendapatkan Hasil Pendataan yang akurat	1 Dokumen	10.000.000	10.000.000	100%	
Program Sosialisasi Kebijakan Kependudukan	Sosialisasi kebijakan kependudukan	Input : Dana dan SDM Output : Terlaksananya kebijakan kependudukan Outcome: Mendapatkan Hasil data penduduk	25 Org	10.000.000	10.000.000	100%	

RENCANA KERJA

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA**

**KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
TAHUN ANGGARAN 2017**



RENCANA KERJA

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
TAHUN ANGGARAN 2017**